



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA

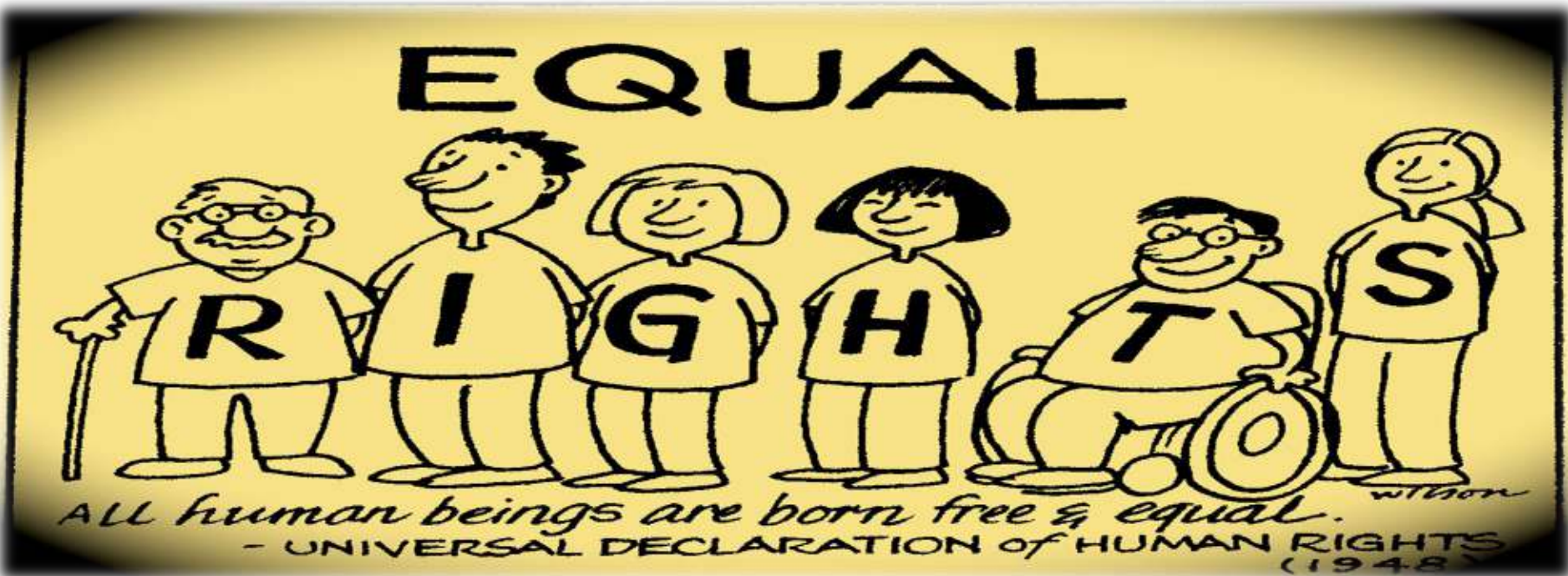
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: SERTA TANTANGAN TAHUN 2019



Drs. Jumsadi Damanik, SH, M. Hum
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDAPROVSU



**HAK SETIAP WARGA NEGARA
UNTUK MENIKMATI DAN BERPARTISIPASI
DALAM PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG**





AGENDA

1. MENINGKATKAN PERANAN DAN KETERWAKILAN **PEREMPUAN** DALAM POLITIK DAN PEMBANGUNAN
2. MELINDUNGI **ANAK, PEREMPUAN** DAN KELOMPOK MASYARAKAT MARJINAL

Gambaran Umum Sumatera Utara



Proporsi Jumlah Penduduk Sumut



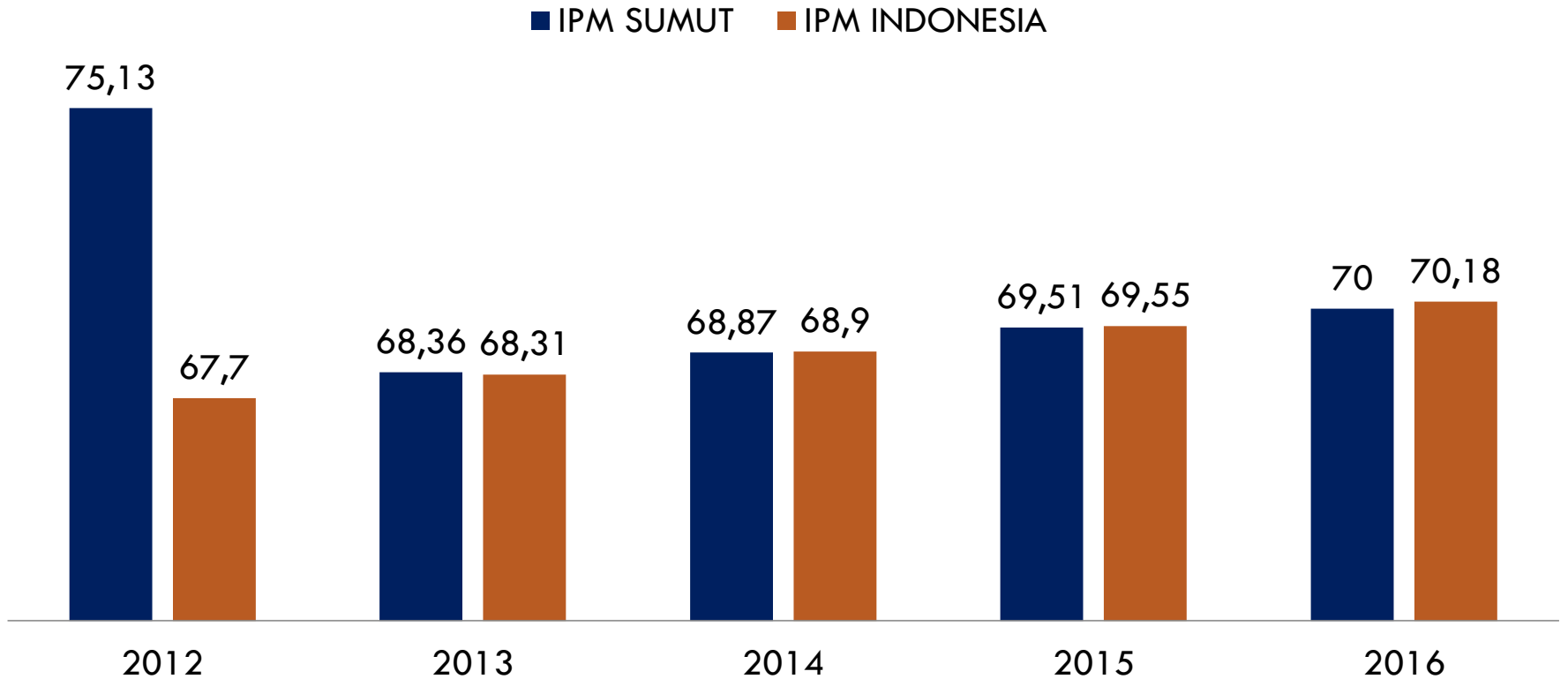
Jumlah penduduk (BPS, 2017)
14.262.147 jiwa

Laki-Laki : 7.116.896 jiwa (49%)
Perempuan : 7.145.251 jiwa (51%)

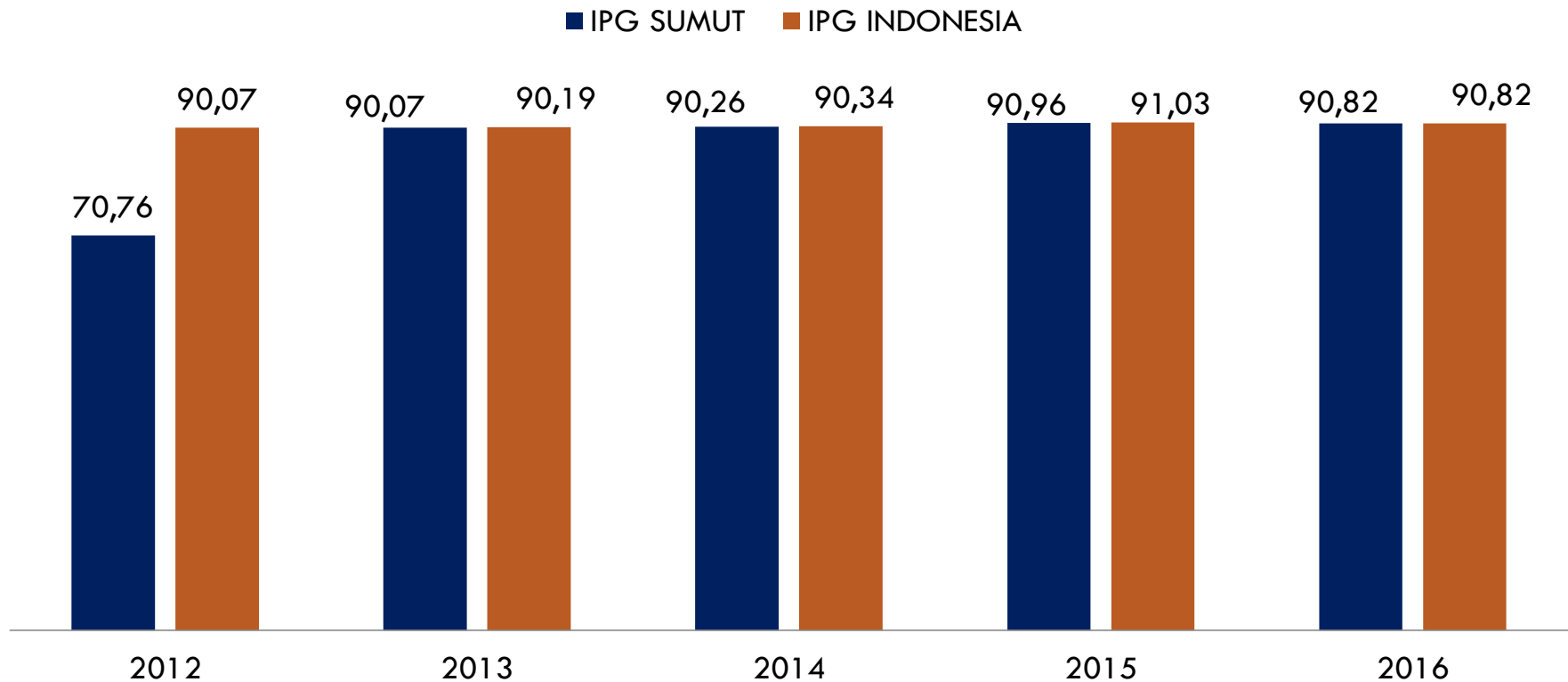
sex ratio : 99,60
(setiap 100 perempuan terdapat 99 laki-laki).

Jumlah Penduduk Miskin (BPS, 2017)
Perkotaan : 663.270 jiwa
Perdesaan : 663.000 jiwa
Total : 1.326.227 jiwa (9,30%)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia - Sumut

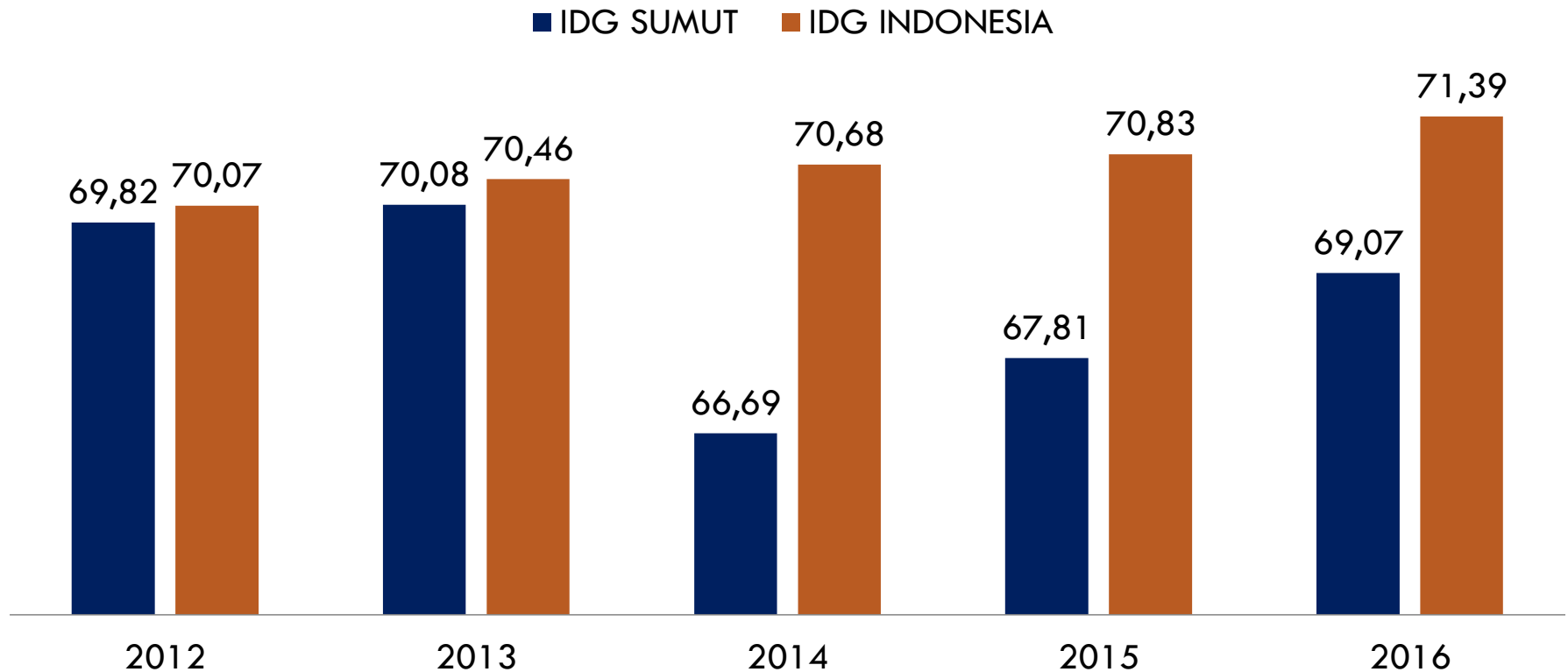


Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia - Sumut



- ❑ IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan dalam pencapaian antara laki-laki dan perempuan.
- ❑ Semakin besar perbedaan gender dalam pembangunan manusia, semakin rendah IPG dibandingkan dengan nilai IPM-nya

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia - Sumut

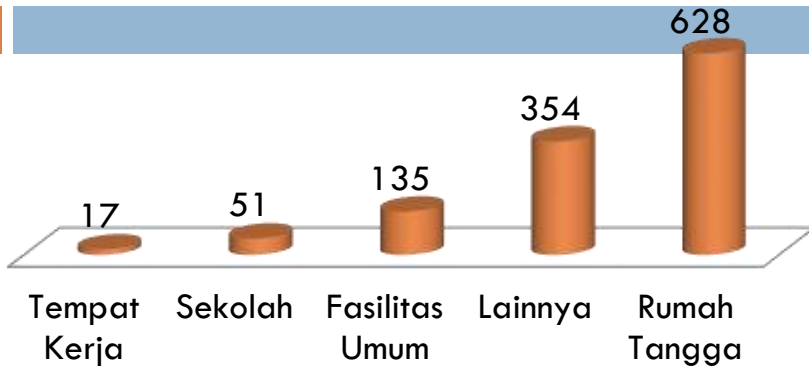


☐ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan Indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan Perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang Politik dan Ekonomi.

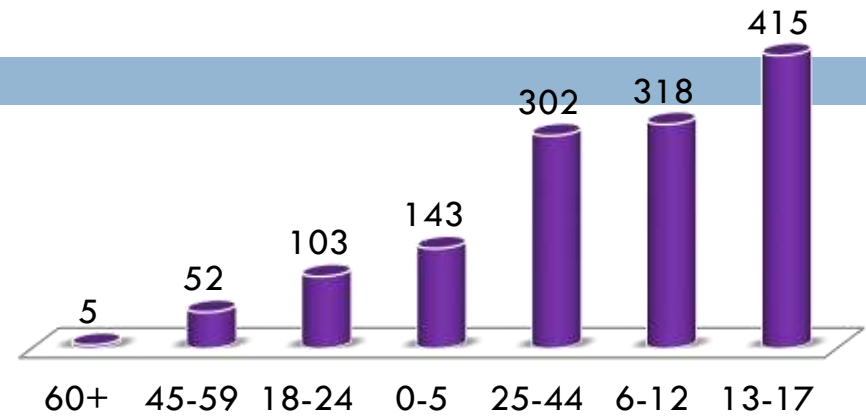
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sumut 2017



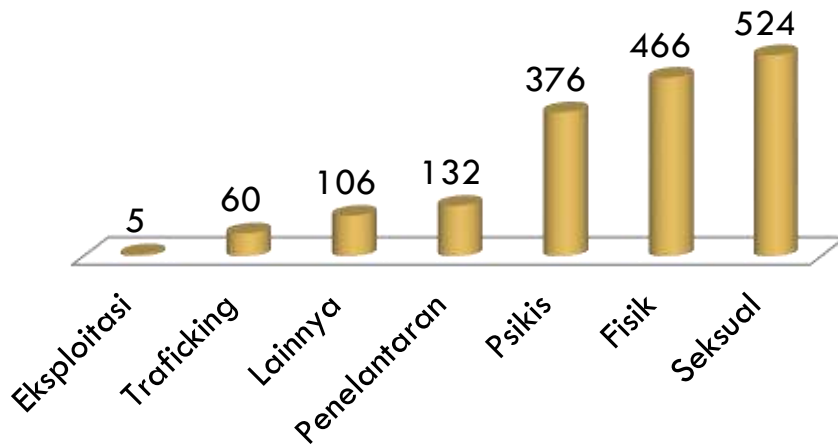
Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian



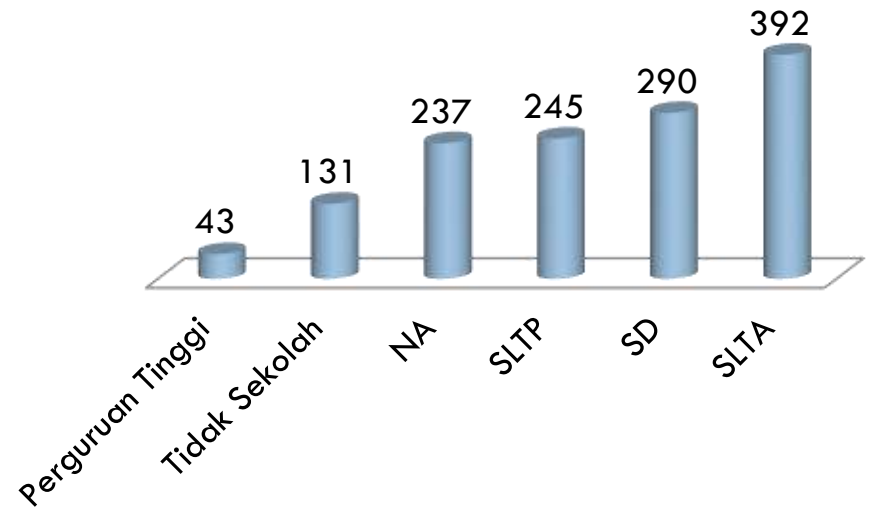
Korban Berdasarkan Usia



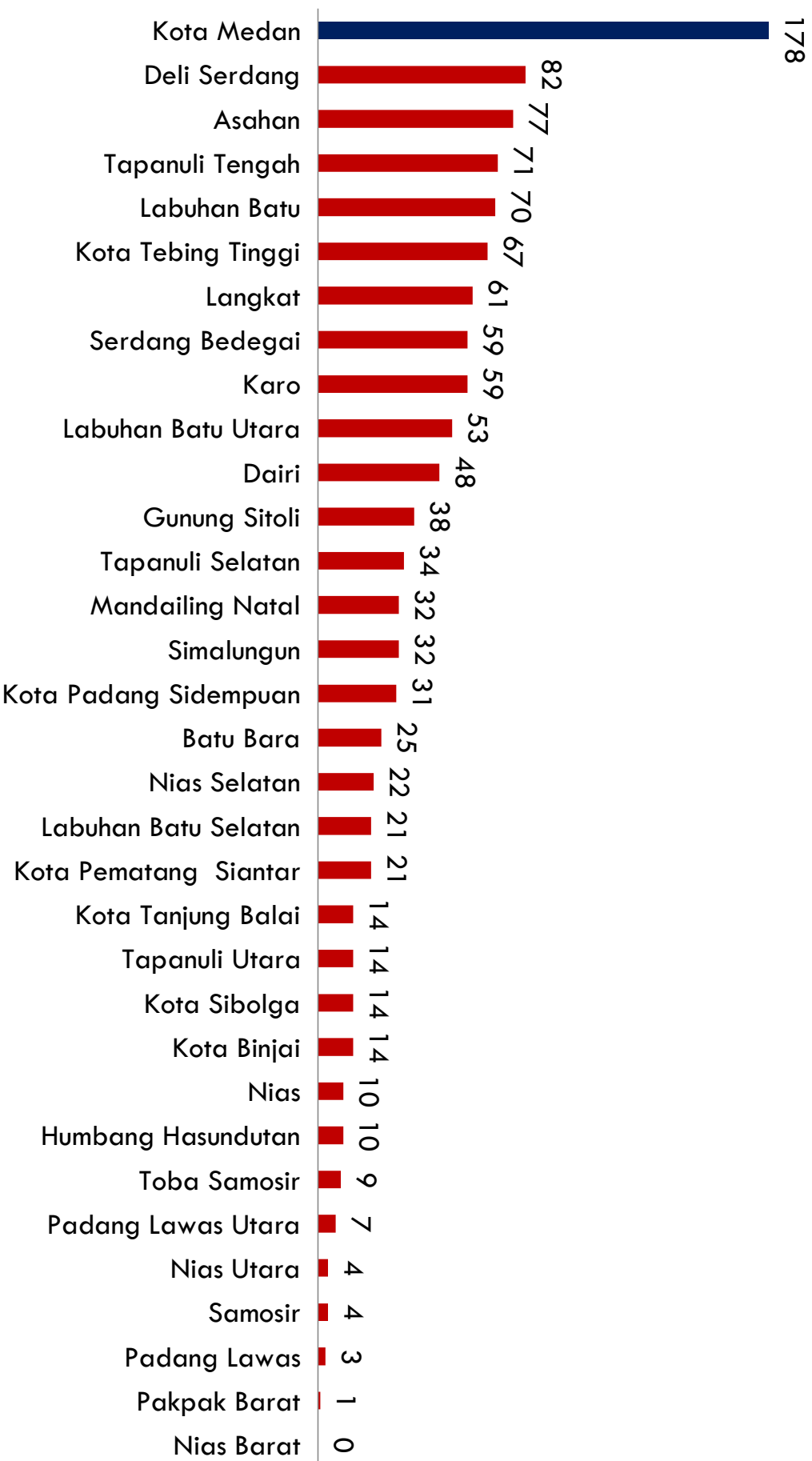
Jenis kekerasan yang dialami Korban



Korban Berdasarkan Pendidikan



Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak per Kab/Kota, Sumut 2017





KAB/KOTA
Layak Anak

PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM **NAWACITA**

N.2 Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.



N.4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

b. Melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal.



ISU STRATEGIS

- 1. Masih tingginya angka kekerasan dan kerentanan terhadap perempuan termasuk kasus TPPO;**
- 2. Belum optimalnya kinerja lembaga layanan rujukan lanjutan dalam menangani kasus kekerasan tersebut termasuk TPPO;**
- 3. Kurangnya lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha yang menyediakan layanan perlindungan perempuan dan anak;**
- 4. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;**
- 5. Belum optimalnya upaya peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;**
- 6. Belum optimalnya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;**
- 7. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan.**

STRATEGI & KEBIJAKAN



STRATEGI

1. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
2. Meningkatkan kualitas layanan rujukan lanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan.;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan lembaga layanan rujukan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO yang memiliki standar layanan;
4. Pengarusutamaan gender melalui optimalisasi regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat dan swasta;
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas perempuan sebagai modal dalam pengembangan karir dan potensi termasuk hak politik sebagai kader atau calon anggota legislatif;
6. Meningkatkan keberdayaan perempuan melalui pembinaan kelompok, pemberian pelatihan dan keterampilan tambahan serta bantuan alat;

STRATEGI (*lanjutan.....*)

7. Meningkatkan peran kelembagaan dan ketersediaan sumber daya pengelolaan Puspaga;
8. Meningkatkan Capaian KLA melalui pendampingan, fasilitasi, bimbingan teknis, koordinasi , pelibatan lembaga non pemerintah , dunia usaha, media massa dan sinkronisasi antar kabupaten/kota dengan provinsi;
9. Meningkatkan kelembagaan yang menyediakan layanan Anak Membutuhkan Pelayanan Khusus (AMPK) melalui pemetaan, pembinaan dan pendampingan kelembagaan;
10. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web.

KEBIJAKAN

1. Membangun kemitraan dengan lembaga layanan terkait perlindungan perempuan;
2. Pelaksanaan KIE dan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan difokuskan pada daerah yang rawan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO;
3. Meningkatkan kualitas layanan yang diprioritaskan pada SDM yang bertugas di Lembaga P2TP2A serta sarana prasarana yang menunjang secara langsung kinerja pelayanan;
4. Membangun jejaring kelembagaan layanan rujukan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO yang memiliki standar layanan pada tingkat propinsi dan kab/kota;
5. Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan fokus pada kebijakan teknis PUG, pelatihan penyusunan dan pendampingan PPRG, optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan PUG;
6. Peningkatan dan pelibatan perempuan dalam berbagai proses dan tahapan pembangunan;

KEBIJAKAN (*lanjutan.....*)

7. Peningkatan kemandirian ekonomi dengan fokus pada penguatan akses modal dan jaringan pada kelompok usaha perempuan;
8. Optimalisasi fasilitasi dan pendampingan pembentukan Puspaga di Kabupaten/Kota sesuai standar;
9. Peningkatan Capaian KLA dengan fokus pada pembentukan forum anak, pengembangan percontohan SRA (Sekolah Ramah Anak), pengembangan layanan kesehatan ramah anak, pengembangan ruang bermain ramah anak dan koordinasi antar kabupaten/kota dengan provinsi;
10. Peningkatan peran dan layanan kelembagaan dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM layanan Anak Membutuhkan Pelayanan Khusus (AMPK) dari 15 kategori baik lembaga pemerintah dan non pemerintah;
11. Penyiapan aplikasi data gender dan anak dengan fokus pada update data dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data.

PROGRAM PRIORITAS



1. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
3. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;
4. Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak.

KEGIATAN PRIORITAS

- I. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
 1. Penguatan dan Fasilitasi Perempuan dan Anak Dalam Kondisi Tertentu;
 2. Advokasi pengintegrasian materi KDRT dalam kursus calon pengantin;
 3. Fasilitasi dan Pelatihan SDM anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO;
 4. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (BK-TKI);
 5. Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

KEGIATAN PRIORITAS lanjutan....

II. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

1. Advokasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang sosial, politik dan Hukum;
2. Penguatan PUG Bidang Ekonomi;
3. Pelatihan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) bagi pelaku industri Rumahan;
4. Fasilitasi pelaksanaan PUG bidang Pembangunan Keluarga;
5. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan Kebijakan PUG bidang Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pembangunan Keluarga.

KEGIATAN PRIORITAS lanjutan....

III. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak

1. Penguatan Penyelenggaraan PRA (Puskesmas Ramah Anak);
2. Fasilitasi pemenuhan hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak;
3. Penguatan/pembentukan Pusat Informasi layak anak;
4. Penguatan/pembentukan Kab/Kota Layak Anak;
5. Penguatan Penyelenggaraan SRA (Sekolah Ramah Anak);
6. Penguatan tentang pemenuhan hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya;
7. Fasilitasi Pengembangan Forum Anak.

KEGIATAN PRIORITAS lanjutan....

IV. Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak

1. KIE pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penguatan Forum Data Terpisah Gender dan Anak;
3. Penyusunan profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

PERMASALAHAN & TANTANGAN

1. Belum optimalnya upaya percepatan pembangunan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak melalui PUG dan PUHA dengan sasaran lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah;
2. Belum memadainya jumlah SDM potensial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Belum optimalnya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemberdayaan bagi perempuan pada situasi dan kondisi tertentu (bencana alam, konflik, disable, lansia dll);
4. Belum optimalnya penanganan kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak yang dilaksanakan secara terpadu dan berbasis gender;
5. Belum optimalnya penguatan dan perluasan jejaring pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat melalui Lembaga Masyarakat;
6. Belum optimalnya penyusunan perencanaan berbasis data terpilah.

TERIMA KASIH

